

## ALASAN TURKI MENGINISIASI PERJANJIAN SOCHI TENTANG KONFLIK SURIAH TAHUN 2018

Muhamad Bayu Adi Pratama<sup>1</sup>

**Abstract:** Turkey involved in the Syrian conflict by participating in the Syrian Peace Process. Turkey also initiated an agreement known as the Sochi Agreement regarding the Syrian conflict in 2018. The Sochi Agreement itself is part of the peace process for Syria which has been implemented since 2017. This article aims to explain the reason why Turkey initiated the Sochi Agreement in 2018 and used qualitative data analysis. The theory used in this research is decision making. The result of this research showed that the reason Turkey initiated the Sochi Agreement regarding the Syrian Conflict in 2018 was based on internal and external factor. Based on internal factor, the reason is the amount of Syrian refugees within Turkey caused financial problem, shaped poor sentiment and caused security issue in Turkish society. Based on external factor the reason is the existence of armed group that become an obstacle for Syrian peace proces.

**Keywords:** Turkey, Sochi Agreement, Syrian Conflict, Decision Making

### Pendahuluan

Turki adalah sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Suriah. Sebagai negara tetangga, konflik yang telah berlangsung lama di Suriah kemudian menjadi perhatian khusus bagi Turki. Konflik di Suriah menyebabkan kerusakan infrastruktur, ratusan ribu orang menjadi korban jiwa, serta jutaan yang lain menjadi pengungsi di negara lain (OHCHR, 2022). Dengan tingginya bencana kemanusiaan yang ada di Suriah, maka sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah menjadikan Turki sebagai negara tujuan pengungsi terbesar di dunia.

Upaya menemukan solusi atas konflik yang berlangsung di Suriah sudah dimulai sejak tahun 2011 dengan melibatkan beberapa pihak seperti Liga Arab, PBB, Amerika Serikat, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan (Priya, 2017). Hingga pada 20 Desember 2016 Turki bersama Rusia dan Iran mengeluarkan *joint statement* atau pernyataan bersama mengenai kesiapan mereka memfasilitasi perundingan antara Pemerintah Suriah dan pihak oposisi (Republic of Turkey, 2016). Dengan adanya pernyataan bersama ini kemudian membuka jalan bagi terealisasinya *Astana Peace Talks* atau Pembicaraan Damai Astana di bawah naungan PBB (United Nations, 2016).

PBB menetapkan Rusia, Iran, dan Turki sebagai penjamin dalam pembicaraan Astana atas kesiapannya untuk menjadi fasilitator. Pembicaraan damai ini dilaksanakan di Astana, Kazakhstan. Pembicaraan yang difasilitasi oleh Rusia, Turki dan Iran ini dihadiri oleh delegasi khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, perwakilan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : bayuadiprta@gmail.com.

kelompok pemberontak Mohammed Alloush, perwakilan pemerintah Suriah Bashar Al Jaafari, dan perwakilan dari Amerika Serikat dan Yordania (BBC, 2011).

Melalui pembicaraan Astana partisipan berhasil menyepakati sebuah memorandum yang mengatur pemetaan empat zona de eskalasi di Suriah. Wilayah yang menjadi zona de eskalasi Suriah meliputi wilayah provinsi Idlib, sebagian wilayah Homs, Ghouta Timur, serta provinsi Daraa dan Quneitra (Putra, 2017). Keempat wilayah tersebut dipetakan sebagai zona de eskalasi karena telah menjadi wilayah pertahanan pihak oposisi selama konflik Suriah berlangsung. Namun pada perjalanannya upaya pemetaan zona de eskalasi ini tidak memberikan hasil positif untuk mengurangi konflik, pemerintah Suriah terbukti melakukan penyerangan ke zona de eskalasi. Di awal September 2018, pemerintah Suriah melakukan penyerangan di bagian selatan Idlib dan membuat setidaknya empat orang penduduk sipil menjadi korban (New York Times, 2018).

Akibat adanya tindakan pemerintah Suriah ini, Turki mengirim permintaan kepada Rusia untuk melaksanakan pertemuan bilateral. Permintaan ini pun disanggupi oleh Rusia dan pada tanggal 17 September 2018, kedua negara melaksanakan pertemuan di Sochi, Rusia dan menyepakati sebuah kesepakatan baru untuk mengamankan zona de eskalasi Idlib yang dinamakan *Memorandum on Stabilisation of the Situation in the Idlib De-escalation Area* atau yang dikenal sebagai Perjanjian Sochi (Heintz dan El-Deeb, 2018).

Secara garis besar isi kesepakatan ini dibuat untuk mencegah operasi militer dan serangan apapun yang ditujukan terhadap Idlib. Kesepakatan yang disepakati oleh Turki dan Rusia ini pula merupakan bentuk realisasi dari proses damai yang dilaksanakan untuk konflik Suriah dan dikenal sebagai Perjanjian Sochi (United Nations, 2018). Perjanjian Sochi yang diinisiasi oleh Turki ini menjadi instrumen penting untuk mengamankan zona de eskalasi Idlib. Turki dan Rusia sendiri telah terlibat dalam pembicaraan damai Astana sebelumnya. Sementara itu peranan Rusia sebagai penjamin dalam pembicaraan menunjukkan bahwa adanya sikap tidak berkomitmen, hal ini dibuktikan ketika Rusia membiarkan Suriah melakukan penyerangan di wilayah zona de eskalasi. Turki tidak harus mengambil resiko untuk menjalin kembali perjanjian Sochi dengan Rusia, kendati demikian Turki tetap melakukan hal tersebut meskipun ada kemungkinan bahwa Rusia akan bersikap sama seperti sebelumnya dan tidak berkomitmen dalam perjanjian. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Turki menginisiasi Perjanjian Sochi tentang konflik Suriah tahun 2018.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Decision Making**

Penulis menggunakan Teori *Decision Making* yang dikemukakan oleh Richard C. Snyder. Snyder menjelaskan bahwa teori *decision making* merupakan salah satu cara untuk memahami perilaku Negara dalam hubungan internasional. *Decision making* memiliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang harus dipertimbangkan oleh suatu Negara. Faktor internal

lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan Negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan antar negara serta situasi dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002). Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga struktur sosial yang melengkapi proses pengambilan keputusan.

Dalam teori ini, Snyder juga menjelaskan indikator yang menentukan suatu keadaan atau kondisi menjadi faktor internal meliputi tiga unsur, yaitu:

1. Lingkungan non-manusia (letak geografis dan sumber daya alam).
2. Masyarakat (organisasi pemerintah dan non pemerintah, partai politik, media, dan opini publik).
3. Lingkungan manusia (budaya dan populasi. Budaya terdiri dari ideologi, sistem pemerintahan, gaya kepemimpinan, budaya, kegiatan ekonomi dan militer. Sementara populasi terdiri dari jumlah penduduk dan sumber daya manusia).

Lalu, faktor eksternal meliputi empat unsur yaitu:

1. Lingkungan non-manusia (geopolitik dan wilayah perbatasan)
2. Budaya lain (globalisasi)
3. Masyarakat negara lain (organisasi internasional non-pemerintah)
4. Masyarakat yang terorganisir dan memiliki fungsi kenegaraan (negara lain, organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Data yang digunakan adalah jenis data primer yang meliputi memorandum, dan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, dan artikel yang dapat diakses melalui media internet yang berkaitan dengan alasan Turki menginisiasi perjanjian Sochi tentang konflik Suriah tahun 2018. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Perjanjian Sochi yang disepakati Turki dan Rusia tahun 2018 merupakan sebuah perjanjian lanjutan dari kesepakatan yang mengatur ketentuan zona de eskalasi di Suriah yang disepakati dalam pembicaraan damai Astana. Perjanjian Sochi mengatur mengenai situasi keamanan di zona de eskalasi Idlib dalam konflik Suriah.

#### **A. Keterlibatan Turki dan Rusia dalam Konflik Suriah**

Konflik Suriah yang terjadi turut membuat Turki dan Rusia memberikan keterlibatannya di dalam konflik. Turki hadir ke dalam konflik untuk mempertahankan keamanan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Suriah serta mendukung adanya reformasi politik Suriah. Di sisi lain, Rusia hadir sebagai rekan dari pemerintah Suriah untuk mempertahankan posisinya sebagai pemerintahan yang sah di dalam konflik. Dengan keadaan Suriah yang semakin memburuk, masyarakat internasional

terus mendorong semua pihak yang terlibat di dalam konflik untuk segera menyelenggarakan sebuah proses perdamaian bagi konflik Suriah.

Sebagai dua negara yang terlibat dalam konflik, Turki dan Rusia turut memberikan pengaruh penting dalam jalannya proses perdamaian. Kedua negara kerap kali tergabung dalam aliansi dalam mencapai perdamaian Suriah. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa proses resolusi konflik melalui proses pembicaraan perdamaian yang melibatkan Turki dan Rusia dalam konflik Suriah, seperti:

### **1. Konferensi Jenewa**

Pada tanggal 30 Juni 2012, Sekretaris Jenderal PBB bersama Liga Arab bertemu di kantor PBB di Jenewa demi membentuk Kelompok Aksi untuk membentuk konferensi proses perdamaian Suriah (BBC, 2012). Sebagai salah satu negara anggota Kelompok Aksi, Turki dan Rusia turut serta untuk bertindak bersama untuk menghadapi situasi krisis. Hasil dari penyelenggaraan Konferensi Jenewa ini adalah sebuah kesepakatan akhir yang dikemas dalam *Geneva Communique* yang menyatakan perlunya sebuah forum untuk badan pemerintahan transisi yang dapat mencakup anggota pemerintah Suriah dan pihak oposisi.

### **2. Perundingan Wina (Vienna Peace Talks for Syria)**

Perundingan Wina adalah hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry dari Amerika Serikat, Sergey Lavrov dari Rusia, Feridun Sinirlioglu dari Turki, dan Aden al-Jubeir dari Arab Saudi, keempat negara melakukan pertemuan di Wina pada tanggal 25 Oktober 2015 untuk membahas mengenai pembicaraan damai baru untuk menyelesaikan konflik Suriah. Pada pertemuan ini disepakati akan diadakannya agenda perundingan putaran pertama pada 30 Oktober 2015 (France24, 2015).

Pada putaran pertama perundingan Wina, isu-isu kemanusiaan, upaya diplomatik, dan penerapan gencatan senjata antar pihak yang bertikai menjadi topik pembicaraan yang dibahas. Putaran kedua perundingan dilaksanakan pada 14 November 2014, secara konstruktif membahas agenda lanjutan pada putaran pertama. Hasil dari putaran kedua ini adalah peserta perundingan berkomitmen untuk memastikan adanya transisi politik yang dipimpin oleh Suriah berdasarkan komunike Jenewa tahun 2012 (Relief Web, 2015).

### **3. Pembicaraan Astana**

Pembicaraan damai Astana adalah salah satu dari berbagai rancangan proses perdamaian yang ditujukan untuk konflik Suriah. Pembicaraan Damai Astana diinisiasi oleh Rusia, bersama rekannya Turki dan Iran melalui pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 20 Desember 2016. Ketiga negara menyatakan kesiapan mereka untuk memfasilitasi perundingan yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah Suriah dan pihak oposisi. Dengan adanya pernyataan bersama ini kemudian Rusia mengajukan proposal kepada PBB mengenai upaya proses pembicaraan damai untuk konflik Suriah dan membuka jalan untuk terealisasinya resolusi konflik di bawah naungan PBB. PBB

juga menetapkan Turki, Rusia, dan Iran untuk menjadi penjamin dalam pembicaraan Astana berdasarkan kesiapan ketiga negara untuk memfasilitasi dan memastikan jalannya proses pembicaraan perdamaian. Pembicaraan ini diselenggarakan di Astana, Ibukota Kazakhstan. Kota Astana dipilih karena dianggap sebagai wilayah netral bagi segala pihak yang terlibat di dalam konflik Suriah.

Peserta yang dilibatkan dalam pembicaraan damai ini diantaranya adalah delegasi khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, perwakilan kelompok pemberontak Mohammed Alloush, perwakilan pemerintah Suriah Bashar Al Jaafari, dan perwakilan dari Amerika Serikat dan Yordania. Pembicaraan damai Astana telah dilaksanakan dalam beberapa putaran, setiap putaran yang dilaksanakan membahas topik yang berbeda. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2017, membahas mengenai rencana implementasi gencatan senjata di Suriah, mekanisme, dan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan antara anggota yang terlibat dalam pembicaraan damai Astana (Xinhua, 2017). Putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 15-16 Februari 2017, membahas mengenai pemantauan bagi gencatan senjata yang telah dicapai pada pertemuan pertama (Seisembayeva, 2017). Putaran ketiga dilaksanakan pada 14-16 Maret 2017, membahas mengenai situs warisan dunia kuno yang hancur akibat perang dan peluang untuk pembangunan kembali beberapa situs yang telah hancur (Orazgaliyeva, 2017).

Dari semua putaran yang telah dilaksanakan oleh peserta pembicaraan, hasil yang paling signifikan dalam menentukan jalannya konflik Suriah berada di pertemuan keempat yang dilaksanakan pada 3-4 Mei 2017. Pada pertemuan ini, berhasil disepakati sebuah memorandum mengenai pemetaan empat zona de eskalasi di Suriah. Kesepakatan ini ditandatangani oleh penjamin perjanjian ini yakni Alexander Lavrentyev dari Rusia, Wakil Sekretaris Kementerian Luar Negeri Turki Sedat Onal, dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossein Jaber Ansari.

Zona de eskalasi yang disetujui dalam pembicaraan Astana ini dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan, memperbaiki situasi keamanan, dan menciptakan kondisi yang mendukung agar terealisasinya proses perdamaian konflik di Suriah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kesepakatan ini sendiri mengatur mengenai beberapa hal utama, antara lain:

1. Pemetaan zona de eskalasi yang mencakup beberapa wilayah di Suriah yang ditinggali sejumlah besar pihak oposisi, seperti sebagian wilayah provinsi Idlib, sebagian wilayah kota Homs, sebagian wilayah Ghouta di bagian Timur, serta sebagian wilayah provinsi Daraa dan Quneitra.
2. Penghentian permusuhan antara pihak yang berkonflik (pemerintah Suriah dan kelompok oposisi yang tergabung dalam gencatan senjata), dimana segala permusuhan harus dihentikan di atas zona de eskalasi.
3. Akses kemanusiaan yang mencakup bantuan medis, sarana air bersih, jaringan listrik, harus segera disediakan bagi masyarakat Suriah yang terimbas akibat konflik.

4. Pembentukan wilayah keamanan di sepanjang garis daerah de eskalasi, yang berisikan pos pemeriksaan untuk mengawasi jalannya akses kemanusiaan terhadap warga sipil dan pos keamanan untuk pengawasan pihak yang berkonflik terhadap ketentuan gencatan senjata.
5. Penjamin harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk ketentuan gencatan senjata dan perang melawan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai teroris seperti *Jabhat al-Nusra* dan semua kelompok, individu, yang terkait dengan *Al-Qaeda* (Russian Federation, 2017).

Namun, di tahun 2018, pemerintah Suriah telah terbukti melakukan penyerangan ke beberapa zona de eskalasi yang telah dicapai dalam pembicaraan damai Astana. Pertama pada 7 April 2018, Pemerintah Suriah melakukan penyerangan yang ditujukan di kota Doma di zona de eskalasi Ghouta Timur dan membuat setidaknya 30 warga sipil menjadi korban. Kedua, penyerangan ke kota Rastan yang berada di zona de eskalasi Homs pada 30 April 2018. Penyerangan ini mengakibatkan tujuh warga sipil tewas dan membuat puluhan orang mengalami cedera berat. Ketiga, aksi penyerangan dilanjutkan zona de eskalasi Dara dan Quinetra yang dilakukan sejak 19 Juni 2018. Penyerangan tersebut mengakibatkan sejumlah 159 orang warga sipil menjadi korban jiwa.

Dengan demikian, setelah penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap zona de eskalasi di tahun 2018 menyebabkan wilayah-wilayah yang dikuasai pihak oposisi kemudian menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Suriah. Hal ini membuat pihak oposisi serta penduduk yang menolak untuk melakukan rekonsiliasi dan tinggal di bawah kekuasaan pemerintah Suriah diberikan opsi untuk dievakuasi ke zona de eskalasi Idlib yang merupakan wilayah terakhir bagi pihak oposisi.

#### **B. Perjanjian Sochi antara Turki dan Rusia Tahun 2018.**

Pada awal September 2018, pemerintah Suriah telah terbukti melakukan penyerangan di bagian selatan zona de eskalasi Idlib. Penyerangan ini telah membuat empat penduduk sipil menjadi korban. Serangan yang dilakukan pemerintah Suriah ke wilayah Idlib kemudian membuat Turki merespon dengan mengingatkan Suriah bahwa penyerangan terhadap wilayah Idlib diyakini dapat mengakibatkan gelombang baru bagi bencana kemanusiaan yang lebih besar, bahkan dapat menyebabkan mundurnya proses perdamaian konflik Suriah yang sedang berlangsung (Wintour, 2018).

PBB memperkirakan bahwa zona de eskalasi Idlib setidaknya ditinggali oleh 3 juta orang termasuk penduduk sipil dan kelompok bersenjata (DW, 2018). Akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah tersebut, ketiga negara penjamin kesepakatan Astana yakni Rusia, Turki, dan Iran melaksanakan pertemuan trilateral demi membahas mengenai permasalahan penyerangan di zona de eskalasi Idlib. Pertemuan antara ketiga negara ini dilaksanakan di Ibukota Iran, Tehran dan berlangsung pada tanggal 7 September 2018.

Di dalam pertemuan ini Turki menyampaikan kekecewaannya terhadap Rusia dan Iran karena tidak dapat menahan penyerangan yang dilakukan pemerintah Suriah. Di pertemuan ini pula Turki menyampaikan permintaannya untuk membuat gencatan

senjata baru yang ditujukan agar dapat melindungi wilayah zona de eskalasi Idlib. Namun permintaan ini ditolak oleh Rusia dan Iran dengan alasan pembentukan gencatan senjata baru dapat menghalangi proses pembersihan kelompok teroris dari zona de eskalasi Idlib. Akhirnya pertemuan ini pun berakhir tanpa adanya resolusi signifikan mengenai penyerangan yang dilakukan pemerintah Suriah.

Kendati demikian, dengan buntutnya hasil pembicaraan trilateral antara ketiga negara tidak membuat Turki berhenti berusaha untuk melindungi zona de eskalasi Idlib dari situasi buruk yang akan terjadi. Turki kembali mengirim permintaan kembali kepada Rusia untuk melaksanakan pertemuan bilateral mengenai masalah ini. Mendengar permintaan langsung dari Turki, Rusia pun menyanggupi dengan segera dan mengatur sebuah pertemuan eksklusif untuk pembicaraan terkait hal-hal yang telah terjadi di zona de eskalasi Idlib. Pembicaraan ini dilakukan oleh dua kepala negara, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dilaksanakan di Kota Sochi, Rusia pada tanggal 17 September 2018. Pembicaraan ini menghasilkan sebuah kesepakatan dimana kedua pihak menyepakati sebuah memorandum yang dikenal sebagai *Memorandum on Stabilisation of the Situation in the Idlib De-escalation Area* atau yang dikenal sebagai perjanjian Sochi.

Perjanjian Sochi yang telah disepakati ini membahas mengenai hal-hal berikut:

1. Area de-eskalasi Idlib akan dipertahankan dan pos pengamatan Turki akan tetap berfungsi.
2. Rusia akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasi militer terhadap Idlib akan dihindari dan status quo yang ada akan dipertahankan.
3. Pembentukan wilayah demiliterisasi sedalam 15-20 km di dalam zona de eskalasi.
4. Pembentukan garis wilayah demiliterisasi akan ditentukan melalui pembicaraan lebih lanjut.
5. Semua kelompok radikal akan ditarik dari garis demiliterisasi pada 15 Oktober 2018.
6. Semua tank, artileri, pesawat nirawak, dan mortir milik pihak yang berkonflik akan ditarik dari zona demiliterisasi pada 10 Oktober 2018.
7. Angkatan bersenjata Turki dan Rusia akan melakukan patroli terkoordinasi dan pemantauan dengan pesawat nirawak di sepanjang garis demiliterisasi
8. Lalu lintas transit antar kota Aleppo-Latakia dan Aleppo-Hama akan dipulihkan di akhir tahun 2018.
9. Langkah-langkah efektif akan diambil untuk memastikan rezim gencatan senjata yang berkelanjutan di dalam area zona de eskalasi Idlib.
10. Kedua belah pihak akan menegaskan kembali tekad mereka dalam memerangi terorisme di Suriah dalam segala bentuk dan manifestasinya.

### C. Alasan Turki Menginisiasi Perjanjian Sochi

Dalam menganalisis alasan Turki menginisiasi perjanjian Sochi tentang konflik Suriah tahun 2018, penulis menggunakan teori decision making. Sehingga kebijakan yang diambil Turki dilandasi oleh faktor internal yaitu peningkatan jumlah pengungsi Suriah di Turki dan faktor eksternal yaitu keberadaan kelompok bersenjata di zona de eskalasi Idlib.

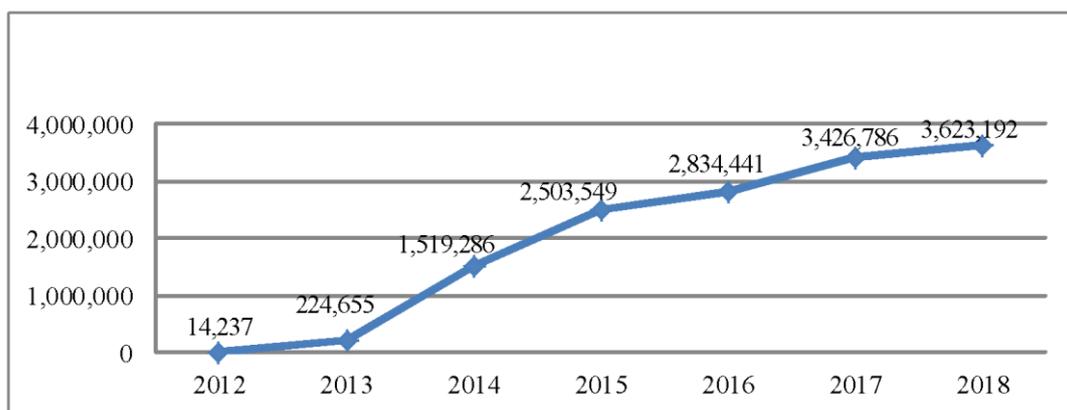
#### 1. Faktor Internal: Peningkatan Jumlah Pengungsi Suriah di Turki

Sejak awal bermula di tahun 2011, konflik Suriah yang berlangsung semakin mengancam keselamatan penduduk Suriah untuk menetap di negaranya. Hal ini menyebabkan besarnya gelombang pengungsi Suriah yang mencari perlindungan ke negara-negara yang lebih aman. Sebagian besar pengungsi Suriah memilih untuk mencari perlindungan ke negara-negara terdekat dari Suriah, yakni Lebanon, Yordania, Irak, Mesir, hingga Turki (UNHCR, 2023)

Pada tahun 2012, pemerintah Turki memberikan instruksi untuk menerima dan memberikan akomodasi bagi warga negara Suriah yang secara kolektif mencari perlindungan di wilayah otonomi Turki. Kebijakan penerimaan pengungsi Suriah tercatat pada Undang-Undang Turki No: 6458 tentang orang asing dan perlindungan internasional. Dengan diambilnya tindakan untuk menerima pengungsi Suriah ini, pemerintah Turki menyambut baik kedatangan mereka ke dalam negaranya melalui prinsip pemberian status perlindungan sementara kepada pengungsi Suriah (Republic of Turkey, 2014).

Pemberian perlindungan sementara oleh pemerintah Turki kepada pengungsi Suriah ini memiliki prinsip *non-refoulement*, yakni suatu negara tidak diperbolehkan untuk menolak atau mengusir pengungsi kembali ke negara asalnya atau ke wilayah di mana pengungsi tersebut akan berhadapan dengan segala hal yang dapat mengancam kehidupan maupun kebebasan mereka. Seiring dengan berjalannya konflik Suriah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki untuk memberikan perlindungan sementara berimbas pada lonjakan masuknya pengungsi ke Turki.

**Grafik 1. Angka Jumlah Peningkatan Pengungsi Suriah di Turki tahun 2012-2018**



Sumber: *Ministry of Foreign Affairs Turkey*

Puncaknya, pengungsi Suriah yang berada di Turki mencapai jumlah 3,6 juta jiwa pada tahun 2016. Hal ini menjadikan Turki sebagai negara penerima pengungsi Suriah terbesar di dunia. Menurut kebijakan perlindungan sementara, pengungsi Suriah yang masuk ke Turki diwajibkan untuk mendaftar sebagai penerima perlindungan sementara untuk mencakup akses terhadap hak-hak dasar pelayanan dan bantuan untuk menerima akses kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, izin perjalanan, dan akses ke pasar tenaga kerja (UNHCR, 2023). Pengungsi Suriah yang telah mendapatkan perlindungan sementara secara resmi oleh pemerintah Turki kemudian diwajibkan tinggal di dalam penampungan sementara sampai ketika Lembaga Manajemen Migrasi menyatakan mereka siap dan memberikan rujukan mereka untuk tinggal di luar penampungan ke provinsi yang akan ditinggali nantinya.

Pada tahun 2014 jumlah pengungsi yang tinggal di dalam penampungan berjumlah 210,358 orang (ORSAM, 2014). Mayoritas dari pengungsi Suriah yang tinggal di kamp pengungsi sendiri dapat dikatakan memiliki kondisi yang sangat baik. Ini dikarenakan pemerintah Turki menyediakan fasilitas lengkap yang mencakup kesehatan dan sanitasi, pangan, pendidikan, olahraga, sampai rekreasi.

Contohnya saja untuk kebutuhan pangan, pemerintah Turki memberikan pengungsi Suriah “kartu pengungsi” sebagai bentuk bantuan bulanan setara 80 Lira Turki yang ditujukan untuk membeli kebutuhan makanan di supermarket lokal (New Humanitarian, 2012). Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di Turki membuat pemberian fasilitas juga turut meningkat. Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menegaskan melalui agenda pertemuan dengan Palang Merah Internasional bahwa pemerintah Turki telah memberikan anggaran dana dalam rentang waktu 2011-2017 kepada pengungsi Suriah dengan jumlah telah mencapai \$30 Miliar (Hurriyet Daily News, 2017).

Sejak masuknya pengungsi Suriah ke Turki, mereka tersebar di beberapa provinsi yang ada, dari 84 jumlah keseluruhan provinsi yang ada di Turki, berikut 11 provinsi yang menampung jumlah pengungsi Suriah paling besar, diantaranya:

**Tabel 1. Persebaran Pengungsi Suriah yang ada di Turki Periode 2011-2018**

No.	Provinsi	Jumlah Pengungsi Suriah	Persentase Dari Total Jumlah Penduduk Provinsi
1	Istanbul	539.697	3,29%
2	Gaziantep	459.751	17,75%
3	Sanliurfa	369.145	14,69%
4	Hatay	354.549	17,51%
5	Adana	250.679	9,97%
6	Mersin	237.227	11,15%
7	Bursa	182.572	5,48%

8	Izmir	143.920	3,15%
9	Konya	122.251	5,10%
10	Kahramanmaras	94.888	7,18%
11	Kilis	87.408	37,48%

Sumber: *Ministry of Foreign Affairs Turkey*

Persebaran pengungsi Suriah paling besar ada di provinsi Istanbul, diikuti oleh Gaziantep, Sanliurfa, dan seterusnya. Mayoritas dari pengungsi Suriah yang berada di luar kamp penampungan melakukan pekerjaan di bidang tekstil, garmen, dan kulit. Pengungsi Suriah di Turki bersedia bekerja dengan upah kerja rendah dengan jam kerja yang tinggi. Pengungsi Suriah bekerja rata-rata 12,5 jam perhari (Haziran, 2018). Hal ini membuat para pemilik lahan perusahaan memanfaatkan pengungsi Suriah untuk menjadi pekerja mereka dengan alasan pemberian gaji yang lebih minim dengan jam kerja yang lebih tinggi.

Hal ini kemudian membentuk pandangan negatif di sebagian oknum masyarakat Turki. Pandangan negatif ini berkembang disebabkan oleh para pelaku usaha lebih memilih mempekerjakan pengungsi Suriah dibanding masyarakat lokal. Oknum-oknum ini memandang bahwa pengungsi Suriah telah membuat masyarakat Turki menghadapi masalah pekerjaan (Frayar, 2017). Bahkan pandangan ini kemudian berkembang sampai tahap yang lebih ekstrim seperti pengungsi Suriah menjadi pesaing tenaga kerja yang merebut lahan pekerjaan warga negara Turki (Ozden, 2013).

Keberadaan pengungsi Suriah juga seringkali menjadi sasaran diskriminasi bagi oknum-oknum yang tidak menginginkan keberadaan mereka di Turki. Seperti yang terjadi di tahun 2014, terdapat beberapa sentimen anti-pengungsi Suriah yang terjadi di beberapa kota dengan jumlah pengungsi Suriah yang tinggi. Seperti aksi protes yang terjadi di kota Kahramanmaras yang menampung lebih dari 15.000 pengungsi. Terdapat aksi protes penolakan terhadap pengungsi Suriah yang mengakibatkan penyerangan terhadap lingkungan dan toko-toko yang ditinggali oleh pengungsi Suriah (Zubeyde, 2014). Terdapat pula kericuhan di kota Gaziantep yang disebabkan oleh adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pengungsi Suriah yang membunuh pemilik rumah sewa. Kericuhan dilanjutkan dengan beredarnya slogan-slogan anti Suriah yang disebar oleh oknum-oknum yang sangat anti dengan pengungsi Suriah.

## 2. Faktor Eksternal: Kelompok Bersenjata di Zona de Eskalasi Idlib

Segera setelah konflik Suriah terjadi pada tahun 2011, wilayah Idlib juga menjadi wilayah di mana pemberontak membentuk kelompok-kelompok bersenjata antara lain *Jabhat Al-Nusra*, *Ahrar Al-Sham*, *Jund Al-Aqsa*, *Hurras Al-Din*, hingga *Free Syrian Army* (FSA).

Dengan berkembangnya banyak kelompok yang memberontak di wilayah Idlib pun membuat kendali pemerintah Suriah atas wilayah ini berakhir pada tahun 2015. Hilangnya kekuasaan pemerintah atas wilayah Idlib dikarenakan kelompok-kelompok bersenjata telah berhasil memukul mundur pemerintah Suriah dan menguasai ibukota

provinsi Idlib. Kelompok bersenjata yang berhasil mengambil alih Idlib adalah sebuah aliansi dari berbagai kelompok yang terdiri dari *Jabhat Al-Nusra*, *Ahrar Al-Sham*, dan *Jund Al-Aqsa* (CNN, 2015). Namun seiring berjalannya konflik, aliansi kelompok bersenjata ini tidak bertahan lama karena adanya perbedaan pendapat dan akhirnya mobilitas kelompok ini berakhir di tahun 2017 setelah *Jabhat Al-Nusra* melakukan restrukturisasi kelompoknya.

Pada 28 Januari 2017, *Jabhat Al-Nusra* melakukan perubahan struktur dengan membentuk sebuah kelompok baru yang dikenal sebagai *Hayat Tahrir Al-Sham* (HTS) dan menjadi entitas paling penting di wilayah Idlib. HTS memiliki tujuan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Assad yang mengontrol Suriah dan menggantikannya dengan negara Islam. HTS melakukan ini dengan maksud untuk mengedepankan agendanya untuk mendirikan sistem pemerintahan khilafah di Suriah. Di tahun 2018, HTS sendiri diperkirakan telah menguasai 60% wilayah di provinsi Idlib dan memiliki jumlah anggota tentara diperkirakan mencapai 30.000 orang (Hall, 2018).

Untuk memenuhi tujuan tersebut, HTS telah mengelola pemerintahan lokal dan melaksanakan fungsi pemerintahan dan bertanggung jawab atas fungsi sipil. Dengan mengontrol pemerintahan di wilayahnya sendiri, HTS akhirnya dapat menguasai fasilitas publik seperti air, listrik dan juga transportasi, sehingga mereka dapat membebaskan biaya layanan dan memberikan pajak kepada masyarakat Idlib yang tinggal di wilayahnya (Titwane, 2018). Di sisi lain, dengan kekuasaan HTS yang mencakup sebagian besar wilayah di zona de eskalasi Idlib dan ancaman yang hadir akibat adanya HTS membuat Turki menetapkan kelompok ini sebagai organisasi teroris pada tahun 2018 (Reuters, 2018).

Menteri luar negeri Turki Mevlut Cavusoglu menegaskan bahwa keberadaan kelompok ini sangat menyulitkan Turki untuk menetapkan titik pengamatan yang disepakati dalam kesepakatan zona de eskalasi yang telah dicapai. Hal ini disampaikannya melalui agenda pertemuan bersama Menteri Luar negeri Rusia mengenai perkembangan konflik Suriah yang diadakan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Moskow. Menteri Luar Negeri Turki juga menambahkan bahwa keberadaan HTS pun berpotensi untuk memundurkan proses pembicaraan damai yang tengah berlangsung (Daily Sabah, 2018).

## Kesimpulan

Dalam kebijakan Turki untuk menginisiasi perjanjian Sochi pada tahun 2018, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor internal, yang menjadi alasan Turki adalah adanya peningkatan jumlah pengungsi Suriah yang tinggal di Turki telah mencapai 3,4 juta jiwa. Dengan tingginya jumlah pengungsi di Turki, maka dalam rentang tahun 2011 hingga 2017 Turki juga telah mengeluarkan setidaknya \$30 Miliar untuk kebutuhan pengungsi Suriah. Tingginya tingkat pengungsi Suriah diikuti dengan adanya sentimen negatif yang terbentuk pada sebagian oknum di masyarakat Turki terhadap pengungsi Suriah. Terdapat beberapa oknum di masyarakat Turki yang tidak menginginkan adanya pengungsi Suriah dan melakukan aksi protes

berujung dengan kericuhan yang menargetkan pengungsi Suriah sebagai sasaran diskriminasi. Lalu, berdasarkan faktor eksternal yang menjadi alasan Turki adalah keberadaan kelompok bersenjata yang ada di wilayah Idlib. Sebagai basis pertahanan terakhir bagi kelompok oposisi, keamanan wilayah Idlib menjadi masalah krusial bagi jalannya proses perdamaian. Keberadaan kelompok bersenjata di zona de eskalasi Idlib telah menghambat proses perdamaian Suriah, hal ini membuat Turki mengambil kebijakan untuk menginisiasi perjanjian Sochi demi memberantas keberadaan kelompok tersebut dari zona de eskalasi Idlib.

### Daftar Pustaka

- AP News, 2018. "Turkey, Russia agree on demilitarized zone in Syria's Idlib", <https://apnews.com/article/moscow-syria-turkey-al-qaida-international-news-88c6ac9ace264d59accd6a0bec2da229>
- BBC, 2012, "UN Envoy Calls For Transitional Government In Syria", <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18650775>
- BBC. 2012. "UN Envoy Calls For Transitional Government In Syria". Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18650775>
- CNN. 2015. "Idlib Direbut Aliansi Islam Garis Keras Suriah". Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150328224631-120-42654/idlib-direbut-alian-si-islam-garis-keras-suriah>
- Daily Sabah. 2018. "Military solution in Syria's Idlib would be disaster, FM Çavuşoğlu warns during Moscow visit". Tersedia di: <https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/08/24/military-solution-in-syrias-idlib-would-be-disaster-fm-cavusoglu-warns-during-moscow-visit>
- Daily Sabah. 2018. "Thousands of Syrian refugees back in school through Turkey's efforts" Tersedia di: <https://www.dailysabah.com/education/2018/05/24/thousands-of-syrian-refugees-back-in-school-through-turkeys-efforts>
- DW. 2018. "UN Warns Of Catastrophe In Syria's Idlib". Tersedia di: <https://www.dw.com/en/syrias-idlib-un-warns-of-chemical-weapons-jihadis-and-humanitarian-catastrophe/a-45296446>
- France24, 2015. "US, Russia, Saudi Arabia And Turkey Discuss Syria Transition". Tersedia di: <https://www.france24.com/en/20151023-syria-talks-vienna-kerry-turkey-usa-saudi-russia>
- Frayer, Lauren. 2017. "For Syrian Refugees In Turkey, A Long Road To Regular Employment", NPR. Tersedia di: <https://www.npr.org/sections/parallels/2017/08/14/543471407/for-syrian-refugees-in-turkey-a-long-road-to-regular-employment>
- Hall, Richard. 2018. "Idlib's Ruling Militant Group Finds Itself Alone As Regime Forces Advance" The National. Tersedia di: <https://www.thenationalnews.com/world/mena/idlib-s-ruling-militant-group-finds-itself-alone-as-regime-forces-advance-1.766200>

- Haziran. Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey. 2018. "Syrian Workers In Turkey" Tersedia di: <https://disk.org.tr/2018/06/syrian-workers-in-turkey/#:~:text=Some%201.6%20million%20Syrians%20in,especially%20const ruction%2C%20textiles%20and%20agriculture>.
- Hurriyet Daily News. 2017. "Turkey spends \$30 billion on Syrian refugees: "Turkey spends \$30 billion on Syrian refugees: FM", 6 November 2017. Tersedia di: <https://www.hurriyetaidailynews.com/turkey-to-continue-responding-to-humanitarian-crises-121982>
- Kementerian Dalam Negeri Turki. 2023. "Temporary Protection in Turkey". Tersedia di: <https://en.goc.gov.tr/temporary-protection-in-turkey>
- Manohar Parrikar Institute For Defence Studies and Analyses. 2011. "Astana Talks: A prelude to Peace in Syria". [https://www.idsa.in/backgrounder/astana-talks-a-prelude-to-peace-in-syria\\_lpriya\\_271117](https://www.idsa.in/backgrounder/astana-talks-a-prelude-to-peace-in-syria_lpriya_271117)
- Orazgaliyeva, Malika. 2017. "Kazakhstan Welcomes Results Of Syria Meeting In Astana, As Russia, Iran And Turkey Issue Joint Statement", The Astana Times. Tersedia di: <https://astanatimes.com/2017/03/kazakhstan-welcomes-results-of-syria-meeting-in-astana-as-russia-iran-and-turkey-issue-joint-statement/> diakses pada 20 Januari 2023
- ORSAM. 2014 "The Situation Of Syrian Refugees In The Neighboring Countries: Findings, Conclusions And Recommendations" Report No: 189. April 2014. Tersedia di: [https://orsam.org.tr/d\\_hbanaliz/Analiz\\_189\\_eng.pdf](https://orsam.org.tr/d_hbanaliz/Analiz_189_eng.pdf)
- Özden, Şenay. Syrian Refugees in Turkey, (San Domenico: European University Institute, 2013), 10
- Relief Web, 2015. "Statement of the International Syria Support Group, Vienna, November 14, 2015". Tersedia di: <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/statement-international-syria-support-group-vienna-november-14-2015>
- Reuters. 2018. "Turki Menetapkan Tahrir Al-Sham Suriah Sebagai Kelompok Terocris". Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKCN1LG1XM>
- Russia Beyond, 2017. "Deescalasi Konflik Suriah, Rusia, Turki, Iran Akan Petakan Daerah Keamanan", tersedia di [https://id.rbth.com/news/2017/05/04/deescalasi-konflik-suriah-rusia-turki-iran-akan-petakan-daerah-keamanan\\_qyx756836](https://id.rbth.com/news/2017/05/04/deescalasi-konflik-suriah-rusia-turki-iran-akan-petakan-daerah-keamanan_qyx756836)
- Seisembayeva, Aigerim. 2017. "Second Round Of Syrian Talks In Astana Adopt Mechanism To Monitor Ceasefire", The Astana Times. Tersedia di: <https://astanatimes.com/2017/02/second-round-of-syrian-talks-in-astana-adopt-mechanism-to-monitor-ceasefire/> diakses pada 20 Januari 2023
- Snyder, Richard C et al. 2002. Foreign Policy Decision Making. New York: Palgrave Macmillan
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2017. "Memorandum on the creation of de-escalation areas in the Syrian Arab Republic". Tersedia di: [https://archive.mid.ru/en/foreign\\_policy/news/](https://archive.mid.ru/en/foreign_policy/news/)

- /asset\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041 diakses pada 21 Januari 2023
- The New Humanitarian. 2012. "Turkey Opens Up To International Aid In Camps" Tersedia di: <https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2012/11/16/turkey-opens-international-aid-camps>
- The New York Times. 2018. "Syria and Russia Bomb Rebel-Held Idlib Province". <https://www.nytimes.com/2018/09/08/world/middleeast/syria-and-russia-bomb-rebel-held-idlib-province.html>
- Titwane. 2018. "Surviving In Syria's 'Forgotten Province'" The Atlantic. Tersedia di: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/idlib-rebels-assad-syria/565160/>
- UNHCR. 2023. "Verification of Syrian nationals under temporary protection" Tersedia di: <https://help.unhcr.org/turkiye/information-for-syrians/verification-of-syrian-nationals-under-temporary-protection/> diakses pada tanggal 27 Juli 2023
- UNHCR. 2023. Operational Data Portal Refugee Situations. Tersedia di: <https://data.unhcr.org/en/situations/syria>
- United Nations Security Council. 2016. Resolution 2336 (S/RES/2336, 2016). Tersedia di <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2336>
- United Nations, 2015. "Note To Correspondents: Vienna Communique on Syria". Tersedia di: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2015-10-30/note-correspondents-vienna-communique-syria>
- Wintour, Patrick. 2018. "Russia And Turkey To Set Up Idlib Buffer Zone To Protect Civilians". Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/17/russia-and-turkey-to-set-up-idlib-buffer-zone-to-protect-civilians>
- Xinhua. 2017. "Astana Talks End With Breakthrough To Resolve Syria Crisis". Tersedia di: [https://www.xinhuanet.com/english/2017-01/25/c\\_136010342.htm](https://www.xinhuanet.com/english/2017-01/25/c_136010342.htm)
- Zubeyde, Yalcin. 2014. "Anti-Syrian Protests Sign Of Growing Tensions In Southern Turkey", Daily Sabah. Tersedia di: <https://www.dailysabah.com/politics/2014/07/22/antisyrian-protests-sign-of-growing-tensions-in-southern-turkey>